



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 93 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Direktur Djenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2223/Sekret/BPU/67 tanggal 2 Mei - 1967, tentang usul pengangkatan Prof. Suria Atmadja sebagai Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung.
- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan diangkatnja Rektor Universitas Padjadjaran Sdr. R. Moh. Sanusi Hardjadinata sebagai Menteri Utama Bidang Industri dan Pembangunan pada Kabinet Ampera berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966, perlu segera mengangkat Rektor Universitas Padjadjaran jang baru;
2. bahwa Sdr. Prof. Suria Atmadja dipandang memenuhi sjarat untuk memangku djabatan Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung.
- Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966;
4. Keputusan Direktur Djenderal Perguruan Tinggi No. 6787/Sekret/BPU/66;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 15 Oktober 1966, memberhentikan Sdr. R. Moh. Sanusi Hardjadinata sebagai Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung, dengan utjapan terima kasih atas jasa-djasanja.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Prof. Suria Atmadja sebagai Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung jang baru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Utama;
2. Para Menteri;
3. Sekretaris Negara;
4. Para Sekretaris Djenderal Departemen;
5. Para Direktur Djenderal Departemen;
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Kantor Urusan Pegawai.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan se-perlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 24 Djuni 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

sb.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 93 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 28 Maret 1967, No.2420/67/04 perihal Pengesahan Protokol tahun 1966 untuk memperpanjang lagi Persetujuan Gula Internasional tahun 1958 ;
- Menimbang** : a. bahwa Dewan Gula Internasional dalam sidangnja jang dilangsungkan dari tanggal 2 sampai tanggal 3 Nopember 1966, telah menjetudjui Protokol tahun 1966 untuk memperpanjang lagi Persetujuan Gula Internasional tahun 1958 sebagai pengganti Protokol tahun 1965 jang habis masa berlakunja pada tanggal 31 Desember 1966 ;
- b. bahwa perpanjangannya untuk ketiga kalinya ini, berlaku sampai tanggal 31 Desember 1968 telah diadakan oleh karena Dewan Gula Internasional belum berhasil mentjip-takan persetujuan baru sebagai pengganti Persetujuan Gula Internasional tahun 1958 ;
- c. bahwa oleh karena Wakil Pemerintah Republik Indonesia telah menjetudjui Protokol tersebut dan penandatanganan Protokol itu telah dilakukan di London pada tanggal 30 Desember 1966 dengan disertai pernyataan akan diusahakannya pengesahan Protokol tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia sebelum tanggal 1 Djuli 1967 ;
- d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak ada keberatan untuk mengesahkan Protokol tahun 1966, untuk memperpanjang Persetujuan Gula Internasional tahun 1958 ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar ;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.XXXVIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1965 ;
4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta tertanggal 22 Agustus tahun 1960 No.2826/HK/60 ;
- Mendengar** : Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Pengesahan Protokol tahun 1966 untuk memperpanjang Persetujuan Gula Internasional tahun 1958 (Protocol of 1966 for the further prolongation of the International Sugar Agreement of 1958) jang pada tanggal 30 Desember 1966 diterima dan ditandatangani oleh Wakil Pemerintah Republik Indonesia di London.

Salinan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong,
2. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong,
3. Ketua Presidium dan Para Menteri Utama,
4. Menteri Luar Negeri,
5. Menteri Perkebunan,
6. Menteri Perdagangan dan
7. Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 24 JUNI 1967
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S. Soeharto

SOEHARTO
JENDERAL T.N.I.

Responsible for
Administrative only

INTERNATIONAL SUGAR CONVENTION

EXECUTIVE DIRECTOR

To: All Participating Governments

Subject: Protocol of 1966 which amends the Convention of Organization of the International Sugar Administration of 1958

For: Information and necessary action

Reference and
Signature

Reference
of
Signature

Reference
of
Signature

1. The Secretary General of the Convention has received from the members of the Convention a request for the prolongation of the Convention until 31st December 1966. The Convention was originally signed on 11th November 1958 at Geneva. The Convention was amended by the Protocol of 1965 which was signed by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Netherlands on 11th November 1965. The Convention is now in force for the United Kingdom and the Netherlands.

2. During the Convention, the Secretary General has received from the Government of the Netherlands a request for the prolongation of the Convention until 31st December 1966. The Convention was originally signed on 11th November 1958 at Geneva. The Convention was amended by the Protocol of 1965 which was signed by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Netherlands on 11th November 1965. The Convention is now in force for the United Kingdom and the Netherlands.

3. The Government of the Netherlands has requested the Secretary General to inform the other members of the Convention of the request for the prolongation of the Convention until 31st December 1966. The Secretary General has received from the Government of the Netherlands a request for the prolongation of the Convention until 31st December 1966. The Convention was originally signed on 11th November 1958 at Geneva. The Convention was amended by the Protocol of 1965 which was signed by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Netherlands on 11th November 1965. The Convention is now in force for the United Kingdom and the Netherlands.

4. The Government of the Netherlands has requested the Secretary General to inform the other members of the Convention of the request for the prolongation of the Convention until 31st December 1966. The Secretary General has received from the Government of the Netherlands a request for the prolongation of the Convention until 31st December 1966. The Convention was originally signed on 11th November 1958 at Geneva. The Convention was amended by the Protocol of 1965 which was signed by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Netherlands on 11th November 1965. The Convention is now in force for the United Kingdom and the Netherlands.

PROTOCOL FOR THE FURTHER PROMULGATION OF THE
INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT OF 1958

The Governments party to the International Sugar Agreement of 1958

Considering that the International Sugar Agreement of 1958 (hereinafter referred to as the Agreement) was extended by the Protocol of 1961 and the International Sugar Agreement of 1958 and the Protocol of 1961 for the further prolongation of the Agreement of 1958 (hereinafter referred to as the Agreement) will expire on 31 December 1965

Desiring to continue the International Sugar Agreement under the same conditions as those provided in the Agreement of 1958 and the Protocol of 1961

Have agreed on the following provisions:

1. The International Sugar Agreement of 1958 and the Protocol of 1961 shall be extended for a period of five years from 31 December 1965 to 31 December 1970.

2. The extension of the International Sugar Agreement of 1958 and the Protocol of 1961 shall be subject to the condition that the Parties to the Agreement shall continue to observe the provisions of the Agreement and the Protocol of 1961.

3. The extension of the International Sugar Agreement of 1958 and the Protocol of 1961 shall be subject to the condition that the Parties to the Agreement shall continue to observe the provisions of the Agreement and the Protocol of 1961.

4. The extension of the International Sugar Agreement of 1958 and the Protocol of 1961 shall be subject to the condition that the Parties to the Agreement shall continue to observe the provisions of the Agreement and the Protocol of 1961.

5. The extension of the International Sugar Agreement of 1958 and the Protocol of 1961 shall be subject to the condition that the Parties to the Agreement shall continue to observe the provisions of the Agreement and the Protocol of 1961.

6. The extension of the International Sugar Agreement of 1958 and the Protocol of 1961 shall be subject to the condition that the Parties to the Agreement shall continue to observe the provisions of the Agreement and the Protocol of 1961.

7. The extension of the International Sugar Agreement of 1958 and the Protocol of 1961 shall be subject to the condition that the Parties to the Agreement shall continue to observe the provisions of the Agreement and the Protocol of 1961.

8. The extension of the International Sugar Agreement of 1958 and the Protocol of 1961 shall be subject to the condition that the Parties to the Agreement shall continue to observe the provisions of the Agreement and the Protocol of 1961.

9. The extension of the International Sugar Agreement of 1958 and the Protocol of 1961 shall be subject to the condition that the Parties to the Agreement shall continue to observe the provisions of the Agreement and the Protocol of 1961.

10. The extension of the International Sugar Agreement of 1958 and the Protocol of 1961 shall be subject to the condition that the Parties to the Agreement shall continue to observe the provisions of the Agreement and the Protocol of 1961.

Article 4

(a) This Protocol shall be open for signature from 15 November to 30 December 1966, at the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and either of the above-mentioned Governments, or any other Government, by arrangement with the Government of the United Kingdom.

(b) Where ratification, approval or accession is required, the relevant instrument shall be deposited with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

(c) From 30 December 1966, this Protocol shall be open for accession by the Government of any country, and any such accession shall be subject to the provisions of Article 3, or all or part of the provisions of Article 3, as may be agreed with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

(d) This Protocol shall be open for signature by any Member of the Council of Europe, and any such signature shall be subject to the provisions of Article 3, or all or part of the provisions of Article 3, as may be agreed with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Article 5

(a) This Protocol shall remain in force as long as at least one of the Governments which have signed or ratified this Protocol, or which have acceded to it, shall be a party to the Council of Europe. The Council of Europe shall be notified by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of the date on which this Protocol ceases to be in force.

(b) Any Government which has signed or ratified this Protocol, or which has acceded to it, may at any time withdraw from it, and shall be notified of the date on which it ceases to be a party to the Council of Europe. The Council of Europe shall be notified by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of the date on which this Protocol ceases to be in force.

(c) If by 1 January 1967, all Governments which have signed or ratified this Protocol, or which have acceded to it, shall have agreed to put it into force, it shall be in force from that date.

Article 6

Where reference is made in the Agreement or in this Protocol to Governments or countries or States or territories in particular articles, any country not mentioned in Article 31 or 34 of the Agreement, the Government of which either has become a party to the Agreement before January 1, 1964, or has become a party to either of the Protocols or to this Protocol, shall be deemed to be included or referred to accordingly.

Article 7

Governments party to this Protocol shall pay their contributions under Article 36 of the Agreement according to their constitutional procedure. At the first session under this Protocol the Council shall approve the budget for the first year and assess the contributions to be paid by each Participating Government.

Article 8

(1) The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall promptly inform each Government represented at the United Nations Sugar Conference, 1965, of each signature, ratification, acceptance and accession to this Protocol, of each accession thereto, of each withdrawal therefrom received pursuant to paragraph (2) of Article 15 and of the date of entry into force of such accession.

(2) This Protocol, of which there shall be a French, English, Spanish, and Arabic text, shall be deposited with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, who shall transmit certified copies thereof to each signatory and acceding Government.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having been duly authorized to this effect by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE at London, the fourteenth day of November, one thousand nine hundred and sixty five.

Restricted - for
official use only

Memorandum
Number 1

Draft of a letter to be sent by the Minister of Foreign Affairs (or the Highest Diplomatic Representative) in London to the Secretary of State for Foreign Affairs of the United Kingdom (Treaty and Nationality Department) with reference to Article 5 (2) of the Protocol for the prolongation of the International Sugar Agreement of 1958 before 1 January 1967.

Excellency,

(Acting in accordance with the instructions I have received from my Government) I have the honor to refer to paragraph (2) of Article 5 of the Protocol for the prolongation of the International Sugar Agreement of 1958, which was open for signature in London from 11 November 1956 to 31 December 1956 and to inform you as follows.

My Government will not be in a position to deposit its ratification/acceptance/approval of the Protocol in London on 31 January 1967, the date provided for in the said Protocol in accordance with paragraph 2 of Article 5.

My Government undertakes, however, to deposit its ratification/acceptance/approval of the Protocol in London as soon as possible before 1 May 1967.